

# EVALUASI PROGRAM CETAK SAWAH BARU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI

*Evaluation Of The New Rice Field Printing Program In Order To Realize Food Security In Jambi Province*

**Weni Lestari, Enny Andriany, M.Rialdi Syaputra**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi,  
Jl. RM Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura, Kota Jambi

Diterima : 2 Maret 2023; Direvisi : 15 Maret 2023; Disetujui : 26 Maret 2023  
<https://doi.org/10.37250/newkiki.v41.190>

## **Abstract**

*The pattern of agricultural land conversion in Jambi Province is a result of the use of cultivated land from food crop land to plantation crop land and the massive expansion of oil palm plantations. The objectives of this study were: to evaluate the implementation of agricultural land expansion through printing new rice fields in Jambi Province and to analyze the status of the sustainability of the agricultural land expansion program through printing new rice fields in Jambi Province. The results of the evaluation of the rice field printing program in Jambi Province, show that the rice field printing program can be implemented as planned. Expansion of the land faced several obstacles. These constraints include limited farming capital, inadequate farming roads and irrigation facilities, the availability of agricultural tools and machinery that is not sufficient to meet needs, market access and the location of distant land expansion and relatively less fertile land and the relatively low knowledge and skills of farmers. low. The results of the MDS analysis show that the paddy field printing program in Jambi Province is included in a fairly sustainable status with a sustainability index value of 52.94. The policy implications that can be taken are as follows: Infrastructure development policies in the form of construction of agricultural business roads, construction/rehabilitation of tertiary irrigation network facilities, drainage of water disposal and circulation irrigation of water gates and meeting the needs of agricultural tools and machinery (rice threshers, rice field tractors, vehicles tricycle), and optimizing lowland rice farming.*

**Keywords :** Rice Field Printing, Food Security, Multi Dimensional Scalling

## **Abstrak**

Pola konversi lahan pertanian di Provinsi Jambi juga sebagai akibat dari penggunaan lahan budidaya dari lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang begitu masif. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Mengevaluasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi dan Menganalisis status keberlanjutan program perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi. Hasil evaluasi terhadap program cetak sawah di Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa program cetak sawah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Perluasan lahan tersebut menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal usaha tani, jalan usaha tani dan sarana irigasi yang tidak memadai, ketersediaan alat dan mesin pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan, akses pasar dan lokasi perluasan lahan jauh dan tanah yang relatif tidak begitu subur serta pengetahuan dan keterampilan petani yang relatif rendah. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa program cetak sawah di Provinsi Jambi termasuk dalam status cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 52.94. Implikasi kebijakan yang dapat diambil sebagai berikut: Kebijakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha pertanian, pembangunan/rehabilitasi sarana jaringan irigasi tersier, Drainase pembuangan air dan irigasi sirkulasi pintu air dan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Mesin perontok padi, Traktor bajak sawah, kendaraan roda tiga), dan melakukan optimasi usahatani padi sawah.

**Kata Kunci :** Cetak Sawah, Ketahanan Pangan, Multi Dimensional Scalling

## PENDAHULUAN

Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan lahan untuk membangun prasarana ekonomi, sosial, dan pemerintahan terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional adalah degradasi/penurunan kualitas sumber daya lahan, alih fungsi (konversi) lahan subur, dan keterbatasan sumber daya lahan potensial (Mulyani et al. 2011).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bila kita lihat kondisi penggunaan lahan pertanian di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan terutama di tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, seperti yang ditampilkan pada tabel 1. berikut ini :

**Tabel 2.** Luas lahan sawah dan produksi padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2021 (ha)

| No                    | Wilayah              | Luas Lahan (Ha) |               |               | Produksi Padi (Ton GKG) |                |                |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                       |                      | 2019            | 2020          | 2021          | 2019                    | 2020           | 2021           |
| 1                     | Kerinci              | 18.598          | 19.425        | 16.928        | 98.686                  | 100.061        | 91.261         |
| 2                     | Merangin             | 6.180           | 7.772         | 5.177         | 25.134                  | 34.123         | 20.106         |
| 3                     | Sarolangun           | 5.473           | 6.328         | 4.091         | 20.617                  | 21.159         | 15.076         |
| 4                     | Batang Hari          | 4.657           | 6.988         | 5.268         | 15.584                  | 30.434         | 21.801         |
| 5                     | Muaro Jambi          | 3.076           | 5.274         | 4.317         | 8.930                   | 21.775         | 16.560         |
| 6                     | Tanjung Jabung Timur | 8.015           | 12.859        | 7.399         | 34.358                  | 57.279         | 30.643         |
| 7                     | Tanjung Jabung Barat | 7.841           | 7.771         | 6.861         | 32.611                  | 32.097         | 29.972         |
| 8                     | Tebo                 | 4.945           | 5.717         | 4.543         | 18.929                  | 25.995         | 22.717         |
| 9                     | Bungo                | 4.327           | 5.329         | 4.176         | 16.882                  | 19.855         | 15.234         |
| 10                    | Kota Jambi           | 322             | 628           | 358           | 1.051                   | 2.692          | 1.368          |
| 11                    | Kota Sungai Penuh    | 6.102           | 6.683         | 5.294         | 37.152                  | 40.943         | 33.413         |
| <b>Provinsi Jambi</b> |                      | <b>69.536</b>   | <b>84.773</b> | <b>64.412</b> | <b>309.933</b>          | <b>386.413</b> | <b>298.149</b> |

Sumber :BPS Provinsi Jambi, 2022

**Tabel 1.**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Provinsi Jambi (Ha)

| Lahan                 | Tahun      |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Luas Panen (Ha)       | 84.772,93  | 64.412,26  | 60.539,59  |
| Produktivitas (Ku/Ha) | 45,58      | 46,29      | 45,88      |
| Produksi (Ton)        | 386.413,49 | 298.149,25 | 277.743,80 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Di Provinsi Jambi lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan memiliki proporsi paling besar yaitu 54,71%, sisanya 41,52% adalah hutan dan 3,77% digunakan untuk pemukiman dan lain-lain (BPS,Jambi Dalam Angka, 2021). Selama periode 15 tahun terakhir terjadi peningkatan luas lahan perkebunan, terutama perkebunan komoditi unggulan di Provinsi Jambi seperti perkebunan kelapa sawit, karet dan pinang. Hal ini berbeda pada luasan tanaman pangan khususnya padi yang semakin berkurang seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut ini :

Menurut Maya Sari (2020) menemukan fakta bahwa pola konversi lahan pertanian di Provinsi Jambi, bahwa perubahan yang luas areal tanaman pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi (harga komoditas, *share* subsektor pangan) dan pertumbuhan penduduk dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Perubahan yang terjadi pada luas areal tanaman perkebunan lebih banyak dipengaruhi oleh struktur ekonomi (harga komoditas, *share* sektor pertanian, *share* subsektor perkebunan, GDP perkapita, pertumbuhan ekonomi) dan faktor sosial (tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk) dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya kecuali kelapa. Kemudian pola konversi lahan pertanian di Provinsi Jambi juga sebagai akibat dari penggunaan lahan budidaya dari lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang begitu masif.

Menyadari kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konversi lahan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (BAPPENAS, 2015). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi

lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional. Selain itu, dengan diterbitkannya undang-undang ini, pemerintah berharap dapat melindungi lahan-lahan pertanian pangan dari konversi lahan dan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan abadi pertanian.

Kebijakan lain dalam mendukung ketahanan pangan adalah perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi) yang dikenal dengan program cetak sawah. Pelaksanaan program ini diiringi pengendalian konversi lahan pertanian, peningkatan produktivitas (intensifikasi) di lahan yang sudah ada, dan penurunan kehilangan hasil (efisiensi) pertanian. Perluasan lahan pertanian juga harus didukung penataan kepemilikan lahan, penyediaan infrastruktur mendukung pertanian, peningkatan nilai ekonomi usaha tani, pengendalian laju penduduk dan distribusinya, sistem insentif, dan penegakan hukum dan penerapan inovasi teknologi (Hikmatullah et al. 2002; Agus 2007; Rachmat 2011; Wahyunto dan Widiastuti, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di lima kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan lokasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui program cetak sawah baru di Provinsi Jambi. Perluasan lahan pertanian

menimbulkan dampak dan permasalahan baik sosial ekonomi, budaya dan lingkungan. Permasalahan perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi berupa keterbatasan akses jalan, konflik lahan, karakteristik sosial budaya masyarakat, sarana irigasi, jalan pertanian dan alat mesin pertanian yang tidak memadai, keterbatasan modal dan lembaga keuangan, lahan yang tidak begitu subur (lahan pasang surut, area rembesan air panas), serta pengalaman dan keterampilan usaha tani terbatas. Beberapa pertanyaan penelitian mengenai implementasi program cetak sawah baru di Provinsi Jambi sebagai berikut Bagaimana evaluasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi dan Bagaimana status keberlanjutan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi. Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : Mengevaluasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi dan Menganalisis status keberlanjutan program perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi.

#### **LANDASAN TEORI Perluasan Lahan Pertanian dan Konversi Lahan**

Program perluasan lahan pertanian sudah sejak lama dilakukan pemerintah yang diawali dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 1980. Keppres ini dikeluarkan dengan pertimbangan: 1) untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras dan dalam rangka usaha swasembada pangan serta untuk meningkatkan pendapatan para petani, 2) tersedianya tanah yang menurut kemampuan serta kemungkinannya dapat dijadikan areal pertanian persawahan, dan 3) kegiatan pembangunan irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah perlu diikuti dengan kegiatan pencetakan sawah. Kegiatan pencetakan sawah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan instansi lain yang dianggap perlu. Penetapan calon lokasi kegiatan perluasan lahan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah setempat dengan memperhatikan: a) tata guna tanah, b) sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan c) rencana pembangunan daerah setempat.

Hikmatullah et al. (2002) menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencetakan lahan sawah baru, yaitu: (i) tidak adanya perencanaan yang matang dalam pemilihan lokasi dan pelaksanaan kegiatan, (ii) adanya benturan

kepentingan dalam menyikapi undang-undang otonomi daerah, (iii) ketersediaan jaringan irigasi dan sumber air irigasi yang terbatas, dan (iv) ketersediaan alat-alat berat yang cukup terbatas.

Lahan sawah yang tersedia banyak yang dialih fungsikan ke penggunaan lain, baik ke usaha tani non sawah maupun ke penggunaan non pertanian. Konversi lahan sawah tidak dapat kembali sebagai sawah dan jika tidak ada pengendalian maka cenderung meningkat (Simatupang dan Irawan 2002; Sumaryanto dan Sudaryanto 2005).

Kerugian ekonomi dan sosial dari alih fungsi lahan pertanian dinilai sangat besar mengingat tingginya biaya investasi dan lamanya waktu yang dibutuhkan sejak awal pembentukan sawah sampai terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas tinggi (Catur et al. 2010).

#### **Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan**

Pengembangan dan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan pada lahan pertanian yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan dapat melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan

secara berkelanjutan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, serta mempertahankan keseimbangan ekologis sehingga mampu mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan (Kementan RI, 2015).

Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan selama enam bulan (Mei-Oktober 2021) di lima kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Bungo, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat kepada petani atau kelompok tani peserta program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian RI. Pemilihan lokasi tersebut diasumsikan mewakili dari tiga zona Provinsi Jambi, yaitu wilayah barat, tengah dan timur dengan perbedaan kondisi geografis dan kultur masing-masing wilayah dari dataran tinggi

hingga dataran rendah. Data utama yang digunakan berupa data primer dan didukung data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap responden terpilih peserta program cetak sawah baru dan melalui focus group discussion (FGD) dengan informan kunci serta pengamatan di lokasi penelitian. Data sekunder berasal dari literatur, dokumen dari berbagai lembaga terkait di Kabupaten dan Provinsi Jambi Pembangunan Daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis Multidimensional Scalling.

Analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) dengan pendekatan RAP-Farm (The Rapid Appraisal of the Status of Farming) dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai status keberlanjutan program perluasan lahan pertanian di lokasi penelitian. Pendekatan ini dimodifikasi dari program Rapfish (rapid assessment techniques for fisheries) yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia (Alder, Kavanagh dan Pitcher 2004). Penggunaan analisis MDS mempunyai berbagai keunggulan seperti sederhana, mudah dinilai, cepat dan biaya yang diperlukan relatif murah (Pitcher dan Preikhsot 2001). Diadaptasi dari Kavanagh dan Pitcher (2004) tahapan

dalam analisis status berkelanjutan antara lain:

1. Penentuan atribut yang mencakup lima dimensi yaitu: dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan. menurut Buchholz et al. (2009) penilaian keberlanjutan dapat disesuaikan dengan wilayah geografis maupun skala yang menjadi fokus penilaiannya. Hal ini disebabkan kriteria penilaian mungkin berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya namun begitu ada beberapa kriteria yang biasa dipakai dalam penilaian keberlanjutan lahan.
2. Pemberian skor pada kriteria atribut yang mana skor diseragamkan menjadi tiga peringkat.
3. Analisis ordonansi MDS pada setiap atribut untuk menilai indeks dan status keberlanjutan.
4. Penilaian indeks dan status keberlanjutan pada setiap dimensi.
5. Analisis sensitivitas (*leverage analysis*) untuk mengidentifikasi atribut yang paling sensitif yang berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan program perluasan lahan pertanian di Provinsi Jambi.
6. Analisis Monte Carlo untuk melihat pengaruh kesalahan dalam pembuatan skor pada setiap atribut di masing-masing dimensi dengan selang kepercayaan 95%.

7. *Goodness of fit* dilakukan untuk melihat besaran nilai *S-Stress* atau *R Model* yang baik ditunjukan dengan nilai *S-Stress* yang lebih kecil dari 0.25 dan *R* mendekati satu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Responden Penelitian**

Responden yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian berjumlah 83 orang dan seluruh responden merupakan petani peserta program cetak sawah baru di Provinsi Jambi. Kondisi sosial responden sebagai berikut : Komposisi usia responden di wilayah penelitian berkisar antara 22-69 tahun dengan usia rata-rata responden adalah 47 tahun. Komposisi usia responden yang mengikuti program cetak sawah baru berkisar antara usia 26-50 tahun yaitu sebanyak 43 orang atau 51,81%. Jumlah responden paling sedikit pada kisaran usia < 25 tahun yaitu 4,82%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kisaran usia Dewasa produktif yaitu rentang usia 26-50 tahun (Tjiptoherijanto, 2001).

Tingkat pendidikan responden umumnya sudah cukup baik. Rata-rata tingkat pendidikan responden mencapai 6-9 tahun. Mayoritas responden sebanyak 30 orang atau 36,14% menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar dan sebanyak 33,73% atau sejumlah 28 orang berpendidikan SMP. Keadaan ini menunjukkan, sebagian

besar responden berpendidikan rendah namun telah mengenal baca tulis sehingga dapat menunjang petani dalam menerima informasi dan teknologi. Rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam adopsi teknologi baru sehingga dibutuhkan metode khusus karena makin tinggi tingkat pendidikan petani maka semakin tinggi pula pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung kegiatan usaha tani.

Responden di wilayah penelitian memiliki pengalaman usaha tani yang bervariasi, antara 6 tahun sampai paling lama 32 tahun. Pengalaman usaha tani padi mayoritas responden sebanyak 52 orang (62,65%) selama 1-10 tahun dan 18,07% responden telah berpengalaman 11 sampai dengan 20 tahun. Namun, ada sebagian kecil responden (2,41%) memiliki pengalaman cukup lama yaitu sekitar lebih dari 30 tahun. Hal ini dapat terjadi karena di wilayah penelitian sebagian responden telah lama berusaha tani.

Kondisi ekonomi responden di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: Sebagian responden telah memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian yaitu sebagai buruh (harian, sadap, tani), guru, peternak, perkebunan, ojek, wiraswasta dan lainnya. Pekerjaan pada sektor non pertanian tersebut dilakukan

baik di desa maupun di luar desa. Responden sejumlah 28 orang atau 33,73 % memiliki pekerjaan sampingan sebagai berkaitan dengan pertanian, 11 orang responden atau 13,25% mempunyai pekerjaan sampingan bergerak disektor perkebunan. Sedangkan responden sisanya mempunyai pekerjaan yang bervariasi di bidang non pertanian sebagai pertukangan, wiraswasta dan lainnya (Guru,Ojek,Perangkat Desa,PNS).

Lahan sawah yang diusahakan responden di wilayah penelitian untuk kegiatan usaha tani sebelum perluasan lahan sebagian besar merupakan lahan milik dan hanya sebagian kecil yang berstatus sewa dan bagi hasil. Luas lahan yang diusahakan oleh petani berkisar antara 0.25-6 ha dengan luas lahan rata-rata yang dimiliki 1.8 ha. Luasnya lahan yang dimiliki karena sebagian besar responden di lokasi

penelitian selain memiliki lahan atas dasar warisan ataupun hasil membeli juga karena ada tambahan lahan hasil perluasan lahan di mana setiap peserta perluasan lahan mendapatkan lahan seluas 1 ha.

### **Evaluasi Pelaksanaan Perluasan Lahan Pertanian melalui Cetak Sawah Baru di Provinsi Jambi**

Program perluasan lahan di Provinsi Jambi telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga 2018. Sejak awal pelaksanaan program perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi mendapatkan total alokasi yang ditargetkan seluas 16,798 ha, namun yang terealisasi seluas 15,172.2 ha yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten penerima program perluasan lahan pertanian di Provinsi Jambi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Rekapitulasi Target dan Realisasi Perluasan Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2006 s/d 2018

| No | Kabupaten                       | Tahun | Target (ha)  | Realisasi (ha) |
|----|---------------------------------|-------|--------------|----------------|
| 1  | Kerinci                         | 2011  | 500          | 500            |
|    |                                 | 2012  | 600          | 282            |
|    |                                 | 2013  | 500          | 430,3          |
|    |                                 | 2016  | 230          | 230            |
|    |                                 | 2017  | 100          | 100            |
|    |                                 | 2018  | 55           | 55             |
|    | <b>Jumlah luasan sawah baru</b> |       | <b>1.985</b> | <b>1.542,3</b> |
| 2  | Kota Sungai Penuh               | 2012  | 200          | 200            |
|    |                                 | 2013  | 100          | 88             |
|    |                                 | 2016  | 100          | 100            |
|    | <b>Jumlah luasan sawah baru</b> |       | <b>400</b>   | <b>380</b>     |
| 3  | Sarolangun                      | 2006  | 30           | 20             |
|    |                                 | 2007  | 29           | 20             |
|    |                                 | 2008  | 25           | 25             |
|    |                                 | 2009  | 100          | 100            |
|    |                                 | 2011  | 400          | 400            |
|    |                                 | 2012  | 300          | 280.5          |
|    |                                 | 2013  | 625          | 268.5          |
|    |                                 | 2016  | 500          | 500            |
|    |                                 | 2017  | 57           | 57             |



|                       |                          |                          |          |        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|
|                       |                          | 2018                     | 64       | 48,5   |
|                       | Jumlah luasan sawah baru |                          | 2.205    | 1794,4 |
| 4                     | Merangin                 | 2013                     | 542      | 461,4  |
|                       |                          | 2014                     | 80       | 80     |
|                       |                          | 2015                     | 1000     | 1000   |
|                       |                          | 2016                     | 499      | 500    |
|                       |                          | 2017                     | 173      | 173    |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 2.294  |
| 5                     | Bungo                    | 2006                     | 30       | 30     |
|                       |                          | 2007                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2008                     | 50       | 50     |
|                       |                          | 2009                     | 50       | 50     |
|                       |                          | 2010                     | 143      | 143    |
|                       |                          | 2011                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2013                     | 163      | 99.1   |
|                       |                          | 2016                     | 200      | 200    |
|                       |                          | 2017                     | 37       | 37     |
|                       |                          | 2018                     | 45       | 36     |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 915    |
| 6                     | Tebo                     | 2006                     | 30       | 30     |
|                       |                          | 2008                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2009                     | 100      | 75     |
|                       |                          | 2011                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2012                     | 300      | 300    |
|                       |                          | 2013                     | 100      | 83     |
|                       |                          | 2014                     | 100      | 84     |
|                       |                          | 2016                     | 500      | 500    |
|                       |                          | 2017                     | 80       | 80     |
|                       |                          | 2018                     | 50       | 50     |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 1.460  |
| 7                     | Batanghari               | 2007                     | 19       | 19     |
|                       |                          | 2012                     | 300      | 255,1  |
|                       |                          | 2013                     | 300      | 258,5  |
|                       |                          | 2014                     | 200      | 184    |
|                       |                          | 2016                     | 350      | 350    |
|                       |                          | 2017                     | 215      | 215    |
|                       |                          | 2018                     | 55       | 47     |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 1.439  |
| 8                     | Muara Jambi              | 2006                     | 30       | 12     |
|                       |                          | 2009                     | 30       | 30     |
|                       |                          | 2011                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2012                     | 50       | 50     |
|                       |                          | 2017                     | 147      | 147    |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 357    |
| 9                     | Tanjabtim                | 2009                     | 110      | 100    |
|                       |                          | 2011                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2012                     | 600      | 600    |
|                       |                          | 2013                     | 1100     | 833,7  |
|                       |                          | 2014                     | 793      | 660,5  |
|                       |                          | 2017                     | 650      | 650    |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 3.353  |
| 10                    | Tanjabbar                | 2009                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2010                     | 100      | 100    |
|                       |                          | 2011                     | 400      | 400    |
|                       |                          | 2012                     | 600      | 586    |
|                       |                          | 2013                     | 398      | 349,3  |
|                       |                          | 2014                     | 220      | 205    |
|                       |                          | 2016                     | 200      | 200    |
|                       |                          | 2017                     | 560      | 560    |
|                       |                          | Jumlah luasan sawah baru |          | 2,578  |
| Jumlah Provinsi Jambi |                          | 16.798                   | 15.172,2 |        |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Sasaran program perluasan lahan pertanian cetak sawah baru di Provinsi Jambi adalah lahan-lahan yang dimanfaatkan/lahan menganggur yang potensial dijadikan sawah sesuai dengan hasil SICPCL sebelumnya. Output program ini adalah bertambahnya luas baku lahan sawah

serta bertambahnya produksi padi di lahan baru tersebut.

Hasil verifikasi calon lokasi perluasan lahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi menunjukkan bahwa lahan yang calon lokasi perluasan lahan di kabupaten penerima program termasuk dalam area penggunaan lain (APL) pertanian, dan APL budi daya lainnya. Lokasi calon lahan yang telah diukur tersebut tidak termasuk dalam areal sawah eksisting dan tidak termasuk dalam kawasan hutan produksi atau wilayah konservasi sumber daya alam. Lahan calon lokasi sawah tidak termasuk dalam kawasan moratorium gambut, kawasan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), lokasi ijin perkebunan, dan tidak termasuk dalam ijin usaha pertambangan dan izin hak guna usaha (HGU).

Aspek kepemilikan lahan merupakan kendala utama dalam perluasan lahan karena umumnya lahan lokasi tidak memiliki dokumen administrasi yang sah, apalagi menyangkut batas-batas kepemilikan lahan untuk masing-masing anggota kelompok tani. Hal ini, mungkin bisa dimaklumi karena kebiasaan dan adat istiadat setempat yang mengandalkan kesepahaman antar warga setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dan hasil survei

investigasi calon petani diketahui bahwa perluasan lahan yang dikelola oleh petani merupakan lahan milik petani yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Setiap peserta perluasan lahan mendapatkan alokasi seluas satu hektar yang mana lahan tersebut merupakan lahan milik mereka yang sebelumnya tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan bukan untuk lahan budidaya. Jadi program perluasan lahan cetak sawah baru tidak menambah luas lahan yang dimiliki petani tapi menambah total penguasaan lahan dari yang sebelumnya tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan satu hektar menjadi memiliki satu hektar lahan atau bertambah menjadi dua hektar.

Sawah hasil perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi semuanya sudah dimanfaatkan petani dengan menanam bermacam komoditas seperti padi, palawija dan lainnya. Mayoritas responden (69,88%) memanfaatkan sawah baru dengan menanam padi, sisanya memanfaatkan lahan dengan menanam padi dan palawija. Hal ini sesuai dengan tujuan program perluasan lahan pertanian yaitu menambah luas lahan pertanian dan petani dapat memanfaatkan sawah baru dengan budi daya tanaman pangan. Sawah baru sudah dimanfaatkan oleh

petani peserta program dengan menanam padi, jagung, palawija dan lainnya.

Berdasarkan karakteristik lahan dan pelaksanaan program perluasan lahan pertanian yang dijelaskan di atas, perluasan lahan di Provinsi Jambi menghadapi banyak permasalahan selain juga menimbulkan dampak positif dan negatif.

Sejumlah tantangan dan permasalahan cetak sawah baru ditemukan beberapa sampel lokasi penelitian seperti di Kabupaten Kerinci, Permasalahannya adalah Lahan yang merupakan lahan rawa dalam yang sering kali mengalami kelebihan debit air sehingga dibutuhkan pengaturan sirkulasi air, jalan akses kelokasi sawah yang sempit dan beberapa bagian mengalami kerusakan, jenis bibit yang tidak sesuai kondisi tanah sawah. Kemudian permasalahan cetak sawah baru di lahan adalah akses jalan pertanian yang tidak ada, saat ini menggunakan jalan darurat, rembesan air panas ke areal sawah yang mengakibatkan lahan tidak dapat digunakan, kelompok tani yang kurang mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah kabupaten dalam usaha tani sawah dan akses irigasi pengairan yang tidak menyeluruh.

Kemudian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur permasalahan cetak

sawah baru juga ditemukan : Kepemilikan lahan yang cukup luas dikuasai oleh satu orang, pengalihan kepemilikan lahan dengan diperjualbelikan ke pihak lain lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan cetak sawah baru. Besarnya laju pengalihan fungsi lahan cetak sawah ke penggunaan lain, lemahnya sinkronisasi pembangunan infrastruktur pendukung lahan sawah baru, kurangnya dukungan dari penegak hukum dan peraturan yang sering berubah-ubah.

Selanjutnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat permasalahan cetak sawah baru juga ditemukan seperti : Status lahan pinjam pakai yang sewaktu-waktu oleh pemilik dapat digunakan untuk penggunaan lain, kultur petani perkebunan, selain bekerja pada sektor pertanian juga memiliki perkebunan , seperti pinang, sawit, dan kelapa dalam.

Di Kabupaten Sarolangun dengan total luasan lahan cetak sawah baru sebesar 1794,4 hektar di Kabupaten Sarolangun tidak semuanya memberikan kontribusi yang diharapkan, hanya sekitar 77,90 persen lahan sawah yang produktif, atau yang berhasil untuk dimanfaatkan untuk pertanian, sisanya sebesar 22,09 persen lahan tidak produktif, sejumlah kendala seperti pada lahan cetak sawah baru konflik pertanahan dengan masyarakat

dan perusahaan, mengalami banjir dimana dilokasi tersebut merupakan jenis tanah rawa dalam, seperti di desa mentawak baru dan pematang kabau, kemudian asam tanah yang tinggi, lahan yang sering mengalami kekeringan karena di areal lahan baru tersebut merupakan lahan sawah tadah hujan, oleh karena itu kedepannya perlu adanya pengaturan sirkulasi pengairan pada lahan sawah tersebut.

Secara umum letak geografis lokasi perluasan lahan ini sangat jauh dari pusat kota dan akses jalan dari dan menuju lokasi sangat terbatas dari ketersediaan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Hal ini menyebabkan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan lainnya tidak dapat tersedia setiap saat. Tetapi untuk akses pasar hasil produksi khususnya padi tidak ada kendala karena pada saat musim panen banyak tengkulak yang datang untuk membeli hasil panen petani. Untuk produksi palawija seperti buah dan sayuran umumnya petani menjual langsung ke para konsumen ataupun pedagang pengumpul.

Infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian dan saluran irigasi di lokasi perluasan lahan pertanian cetak sawah baru sudah ada tetapi kondisinya tidak memadai dan banyak yang rusak. Jalan pertanian dengan konstruksi

sederhana berupa jalan tanah yang apabila musim hujan menjadi sangat becek sehingga oleh petani dinilai kurang efektif.

Saluran irigasi yang ada kondisinya masih sangat sederhana dan masih berupa saluran tanah dengan kedalaman dan lebar bervariasi. Saluran irigasi yang ada banyak yang ditumbuhi rumput liar dan tanpa pintu air padahal keberadaan pintu air sangat membantu petani dalam mengatur sirkulasi pengairan ke sawah. Keberadaan rumput dan kedalaman saluran yang bervariasi mengakibatkan kurangnya debit air irigasi yang sampai ke sawah.

Keberadaan sarana pendukung seperti alat dan mesin pertanian terutama traktor roda dua, pompa air dan perontok padi (power thresher) dengan jumlah yang sangat terbatas saat ini belum memenuhi kebutuhan juga dinilai ikut mengakibatkan usaha tani yang dilakukan petani menjadi terhambat terutama pengolahan tanah dan pengairan.

Keberadaan lembaga seperti koperasi sebagai pemberi pinjaman modal dan sarana produksi dinilai sangat kurang. Sehingga petani kesulitan memperoleh modal usaha tani pada setiap awal musim. Akibatnya petani meminjam pada rentenir dan dibayar pada saat panen yang tentunya sangat merugikan karena biasanya

harga gabah pada saat panen sedang murah.

Keberadaan penyuluh pertanian dinilai sangat mendukung usaha tani yang dilakukan walaupun rasio satu desa satu penyuluh tidak terpenuhi. Dukungan yang dilakukan penyuluh petani seperti pendampingan setiap bulan dan setiap awal musim tanam. Selain itu, penyuluh juga mendampingi dalam setiap kegiatan usaha tani dan pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tani. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani terkait pola usaha tani yang baik dirasa sangat perlu penambahan porsi pendampingan dan pelatihan keterampilan usaha tani oleh penyuluh pertanian. Misalnya pendampingan dan penyuluhan tentang pola tanam jajar legowo, pemakaian bibit unggul, pemupukan dan pemakaian alat mesin pertanian serta pemanfaatan lahan bila musim kemarau dengan menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti sayuran atau hortikultura.

Keberadaan kelompok tani dinilai sangat membantu para petani karena lewat kelompok para petani bisa bermusyawarah dan berkomunikasi antar petani baik mengenai kegiatan usaha tani maupun kegiatan sehari-hari dan dukungan kelembagaan lain yang dirasa perlu adalah BULOG selaku

penyerap gabah petani. Akan tetapi peran BULOG relatif tidak signifikan dalam menyerap gabah petani, sehingga petani menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga yang rendah.

#### **Status Keberlanjutan Perluasan Lahan Pertanian melalui Cetak Sawah Baru di Provinsi Jambi**

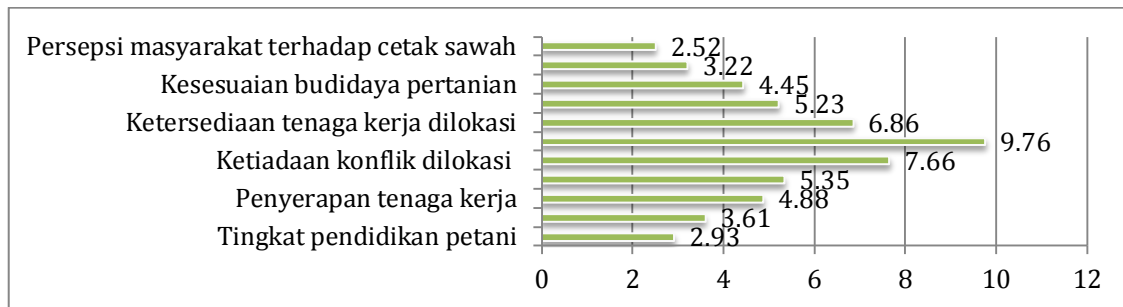
Keberlanjutan program perluasan lahan di Provinsi Jambi dianalisis berdasarkan lima dimensi yaitu dimensi sosial budaya, ekonomi, ekologi, kelembagaan, dan infrastruktur. Atribut yang digunakan pada dimensi sosial budaya berjumlah sepuluh atribut, dimensi ekonomi terdapat enam atribut, dimensi ekologi menggunakan sembilan atribut, dimensi kelembagaan enam atribut dan dimensi infrastruktur dengan lima atribut. Selain menghasilkan nilai keberlanjutan di setiap dimensi analisis keberlanjutan juga menghasilkan atribut yang berpengaruh pada setiap atribut yang dianalisis. Semakin besar nilai sensitifitas maka atribut tersebut semakin berpengaruh terhadap keberlanjutan. Pembahasan mengenai analisis keberlanjutan dan atribut yang berpengaruh terhadap program perluasan lahan di Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **Status Keberlanjutan Program Perluasan Lahan di Provinsi Jambi Nilai Keberlanjutan Dimensi Sosial Budaya**

Hasil analisis MDS terhadap sebelas atribut pada dimensi sosial budaya menghasilkan nilai keberlanjutan

56.47. Status keberlanjutan pada dimensi ini cukup berkelanjutan. Analisis terhadap atribut yang berpengaruh pada

dimensi sosial budaya sebagaimana pada gambar 1.



Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 1.** Atribut keberlanjutan dimensi sosial budaya

Hasil analisis atribut-atribut sensitif yang berpengaruh dalam mendukung keberlanjutan perluasan lahan pada dimensi sosial budaya (Gambar 1), yaitu ketiadaan konflik di lokasi perluasan lahan (7.66), kesesuaian budi daya pertanian dengan kearifan lokal (5.23), luas lahan pertanian yang dimiliki (9.76), motivasi petani dalam usaha tani (5.35), dan ketersediaan tenaga kerja di lokasi cetak sawah (6.86).

Kelima faktor tersebut merupakan faktor utama yang saling terkait dan menentukan keberlanjutan perluasan lahan dimensi sosial budaya. Perluasan lahan sangat sesuai dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Bercocok tanam di sawah maupun ladang bukan mata pencaharian baru bagi masyarakat di lokasi penelitian. Mayoritas masyarakat sebelum perluasan lahan bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, pedagang,

peternak, wirausaha, sebagian kecil sebagai pegawai.

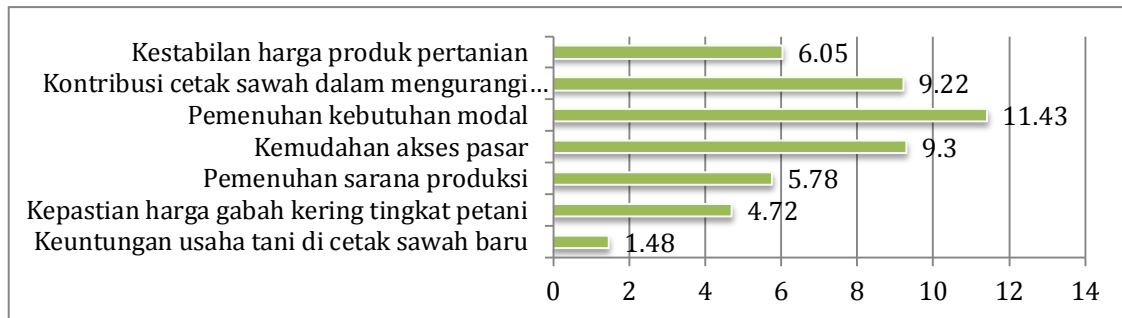
Program perluasan lahan di Provinsi Jambi telah memberikan keuntungan secara sosial yaitu menyerap tenaga kerja sektor pertanian yang memang banyak tersedia di lokasi penelitian tersebut. Selain itu perluasan lahan didukung oleh motivasi petani yang tinggi dalam usaha tani, dan luas lahan yang dimiliki oleh petani peserta. Kesesuaian budi daya pertanian dengan budaya setempat dan penerimaan masyarakat atas program perluasan lahan juga berperan meniadakan konflik antar masyarakat di lokasi perluasan lahan. Namun program perluasan lahan agak terhambat oleh keterampilan petani yang masih kurang dalam kegiatan usaha tani secara intensif di persawahan.

### Nilai Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

Hasil analisis MDS terhadap tujuh atribut dimensi ekonomi menghasilkan

indeks keberlanjutan 49.98 yang berarti status keberlanjutan pada dimensi ekonomi cukup berkelanjutan. Atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan perluasan lahan pada dimensi ekonomi (Gambar 2), yaitu kontribusi sawah hasil perluasan lahan

cetak sawah baru dalam mengurangi kemiskinan (9.22), fluktuasi harga produk pertanian (6.05), ketersediaan modal untuk usaha tani di sawah baru (11.43) dan aksesibilitas pasar produk pertanian (9.30).



Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 2.** Atribut keberlanjutan dimensi ekonomi

Program perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi telah memberikan dampak positif di bidang ekonomi yaitu menyerap tenaga kerja di pedesaan dan menjamin ketersediaan bahan makanan pokok bagi masyarakat sehingga berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mendukung keberlanjutan perluasan lahan yang berarti mendukung kontribusi positif ini terus berlanjut diperlukan modal usaha tani yang cukup yang disertai kemudahan akses pasar untuk menjual produk pertanian yang dihasilkan. Selama ini petani lebih banyak menjual hasil pertanian kepada tengkulak yang ada di desa-desa karena untuk menjual produk pertanian ke pasar

membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

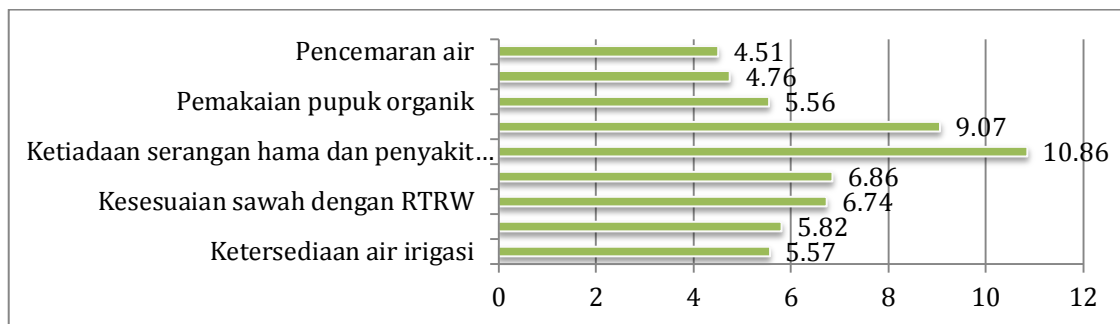
Faktor lainnya adalah kepastian harga jual produk pertanian juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tani terutama harga gabah kering (GKP/GKG) di tingkat petani. Hal yang banyak terjadi di lapangan adalah harga jual yang tidak stabil sehingga dapat merugikan petani karena harga jual produk pertanian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kestabilan harga jual dapat menguntungkan petani sehingga petani tetap semangat dengan kegiatan pertanian dan termotivasi untuk tetap mempertahankan keberadaan lahan sawahnya.

#### Nilai Keberlanjutan Dimensi Ekologi

Analisis MDS terhadap tujuh atribut pada dimensi ekologi menghasilkan nilai keberlanjutan 65.63. Status keberlanjutan pada dimensi ini cukup berkelanjutan. Atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru pada dimensi ekologi (Gambar 3), yaitu pemakaian pupuk dan pestisida kimia sesuai dosis (9.07), bebas hama dan penyakit tanaman di sawah baru

(10.86), penggunaan benih unggul di sawah hasil perluasan lahan (6.86), dan kesesuaian sawah hasil perluasan lahan cetak sawah baru dengan rencana tata ruang wilayah (6.74).

Keempat atribut sensitif di atas merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru dari dimensi ekologi.



Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 3.** Atribut keberlanjutan dimensi ekologi

Pemakaian bibit unggul tentu akan mempengaruhi produksi dan waktu panen padi. Pemakaian benih unggul yang diikuti pemakaian pupuk dan pestisida sesuai dosis anjuran akan mengurangi potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Pemakaian pupuk dan pestisida oleh petani selama ini masih sesuai bahkan di bawah dosis anjuran. Petani tentu akan menggunakan benih unggul yang bisa berproduksi dalam waktu yang lebih singkat dibanding benih padi lokal. Sehingga waktu panen lebih cepat dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu dengan waktu yang relatif

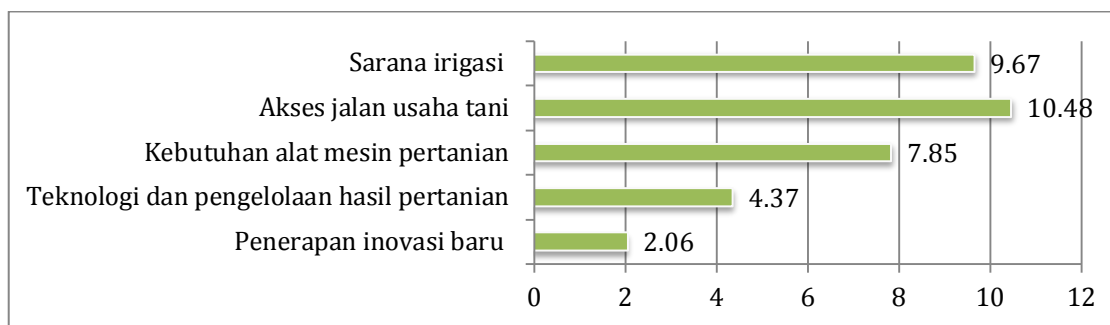
singkat tentu akan mengurangi kebutuhan air untuk irigasi.

### Nilai Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur

Hasil analisis MDS menunjukkan nilai 44.43, yang artinya dari sisi infrastruktur program perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi berstatus kurang berkelanjutan. Atribut-atribut yang mempengaruhi keberlanjutan perluasan lahan pada dimensi infrastruktur antara lain jalan pertanian di lokasi perluasan lahan (10.48), sarana irigasi (bendungan, embung, jaringan irigasi) di lokasi sawah baru (9.67), dan alat dan mesin



pertanian di lokasi sawah baru (7.85) seperti pada gambar 4.



Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.** Atribut keberlanjutan dimensi infrastruktur

Pada gambar 4 terlihat bahwa setelah program perluasan lahan cetak sawah baru di lokasi penelitian, petani terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana seperti alat mesin pertanian yang terbatas, kondisi jalan pertanian dan sarana irigasi yang sangat sederhana. Sampai saat ini untuk pengolahan tanah masih menggunakan cara-cara tradisional, pompa air dan hand sprayer yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan petani. Kekurangan alat perontok menghambat petani pada saat musim panen tiba sehingga panen dilakukan secara tradisional yang menyebabkan susut hasil sangat besar.

Hambatan lainnya adalah jalan pertanian dan saluran irigasi yang tidak memadai. Jalan pertanian sangat sederhana dan tidak layak. Saluran irigasi masih berupa saluran irigasi sederhana yang dipenuhi rumput liar dan tidak dilengkapi pintu air sebagai

penahan air pada saat pasang ataupun surut.

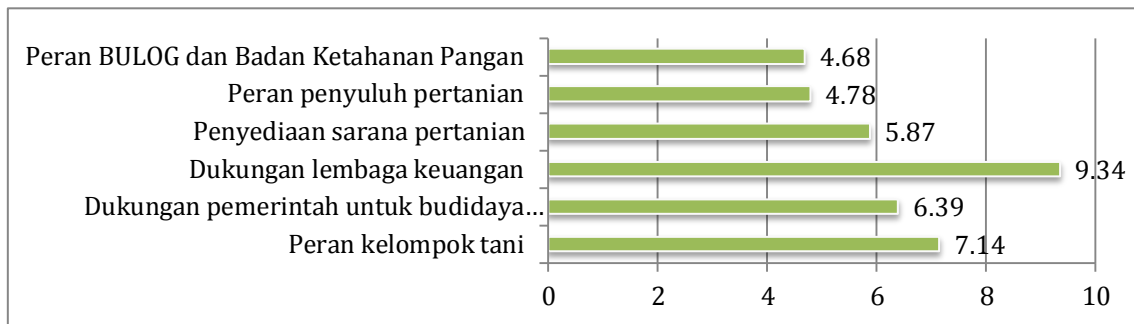
Dukungan anggaran pemerintah dalam usaha budidaya pertanian merupakan elemen penting. Selama ini anggaran didukung oleh Kementerian Pertanian RI dinilai mampu memenuhi kebutuhan pencetakan sawah baru, namun jika kita mempertimbangkan kebutuhan akan areal sawah yang siap untuk ditanami, mungkin ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dari sisi anggaran seperti masih belum cukup membangun saluran irigasi utama dan jalan usaha tani (JUT) yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengolah lahan secara berkelanjutan.

#### **Nilai Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan**

Hasil analisis MDS menunjukkan indeks keberlanjutan 48.20, nilai tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan program perluasan lahan pertanian cetak sawah baru di Provinsi Jambi berstatus kurang berkelanjutan.

Atribut-atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru pada dimensi kelembagaan (Gambar 5) antara lain, yaitu anggaran pemerintah untuk mendukung pertanian di sawah baru (6.39), lembaga

keuangan/penyedia modal (bank, BPR, LKM, koperasi) di lokasi perluasan lahan cetak sawah baru (9.34), penyedia sarana pertanian (toko pupuk, pestisida, benih, dan lainnya) (5.87), dan kelompok tani/gabungan kelompok tani (7.14).



Sumber : Data pirmer diolah, 2021

**Gambar 5.** Atribut keberlanjutan dimensi kelembagaan

Setelah program perluasan lahan di Provinsi Jambi terlaksana, petani terkendala oleh ketiadaan lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya sebagai pemberi modal untuk kegiatan usaha tani di sawah baru. Program perluasan lahan cetak sawah baru didukung oleh penyuluh pertanian yang intens dan aktif mendampingi petani pada saat pelaksanaan dan setelah program selesai. Kehadiran petugas penyuluh lapangan merupakan suatu aspek keberhasilan program cetak sawah, sekaligus dapat menunjang keberhasilan program. Keterbatasan jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten/Kota

tentu saja harus ditingkatkan dan sejalan dengan peningkatan kualitas PPL itu sendiri sehingga diperlukan pelatihan untuk menghasilkan PPL yang baru. Dukungan lainnya adalah keberadaan kelompok tani di mana petani bisa saling belajar dan berkoordinasi sehingga kendala yang ada dalam usaha tani dapat diatasi dan diselesaikan.

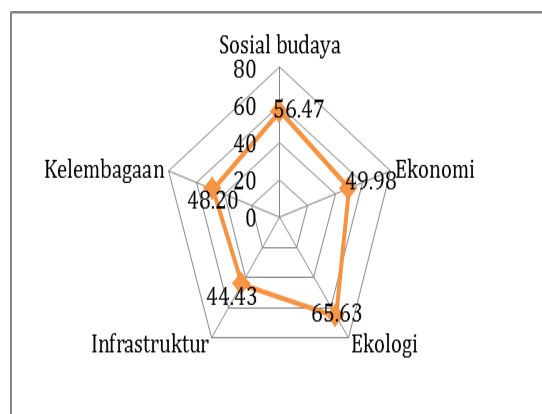
Setelah analisis setiap dimensi dilakukan, analisis secara multidimensi yaitu dimensi sosial budaya, ekonomi, ekologi, kelembagaan, dan infrastruktur menghasilkan nilai keberlanjutan sebesar 52.94 yang menunjukkan bahwa keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi cukup berkelanjutan.

Ringkasan nilai indeks keberlanjutan pada setiap dimensi dan multidimensi dengan nilai *S-stress* sebesar 0.0634 atau 6.34 % yang berarti bahwa model cukup memiliki kelayakan yang baik (fit) dengan nilai RSQ yang cukup tinggi yaitu 0.9421 (94,21%) disajikan pada Tabel 4. gambar jaringan keberlanjutan pada setiap dimensi sebagaimana pada gambar 6.

**Tabel 4.**Indeks keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi

| Dimensi             | MDS (%)      |
|---------------------|--------------|
| Sosial budaya       | 56.47        |
| Ekonomi             | 49.98        |
| Ekologi             | 65.63        |
| Infrastruktur       | 44.43        |
| Kelembagaan         | 48.20        |
| <b>Multidimensi</b> | <b>52.94</b> |

Sumber : Data primer diolah, 2021



**Gambar 6.** Perbandingan indeks keberlanjutan program perluasan lahan cetak sawah baru secara multidimensi di Provinsi Jambi

Hasil analisis MDS yang analisisnya mencakup dimensi sosial budaya, ekonomi, ekologi, infrastruktur dan kelembagaan menunjukkan bahwa program cetak sawah baru di Provinsi Jambi termasuk dalam status cukup berkelanjutan dengan nilai indeks

keberlanjutan sebesar 52.94. Status keberlanjutan program cetak sawah baru tersebut hanya mencapai demikian karena dimensi ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan relatif rendah dan termasuk dalam kategori kurang, yakni kurang dari 50. Sementara aspek ekologi dan sosial budaya merupakan yang tertinggi nilai indeksnya dan termasuk dalam kategori cukup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil evaluasi terhadap program cetak sawah di Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa program cetak sawah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Penambahan perluasan lahan sawah daerah irigasi (DI) telah sesuai dengan yang direncanakan karena hal tersebut terjadi melalui perubahan fungsi lahan milik masyarakat sasaran program cetak sawah baru dari yang sebelumnya tidak dimanfaatkan (lahan tidur).

Hasil analisis MDS yang analisisnya mencakup dimensi sosial budaya, ekonomi, ekologi, infrastruktur dan kelembagaan menunjukkan bahwa program cetak sawah di Provinsi Jambi termasuk dalam status cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 52.94. Status keberlanjutan program cetak sawah baru tersebut hanya mencapai demikian karena dimensi ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan relatif rendah dan

termasuk dalam kategori kurang, yakni kurang dari 50. Sementara aspek ekologi dan sosial budaya merupakan yang tertinggi nilai indeksnya dan termasuk dalam kategori cukup.

### **Saran dan Implikasi kebijakan**

Setelah melihat kondisi lapangan, wawancara dengan responden dan *stakeholders* terkait perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi, alternatif kebijakan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha pertanian, pembangunan/rehabilitasi sarana jaringan irigasi tersier, Drainase pembuangan air dan irigasi sirkulasi pintu air dan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Mesin perontok padi, Traktor bajak sawah, kendaraan roda tiga) yang dapat difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi/Kab/Kota.
2. Melakukan optimasi usahatani padi sawah melalui a) peningkatan produktivitas dengan perbaikan varietas, perbaikan teknologi budidaya dan konservasi sumber daya lahan dan air; b) peningkatan indeks pertanaman padi sawah dengan membangun dan memperluas jangkauan jaringan irigasi serta memanfaatkan sumber

daya air secara optimal, dan c) peningkatan efisiensi usahatani melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

3. Memberikan insentif yang wajar kepada petani untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tukar petani melalui kebijakan subsidi sarana produksi, skim kredit usahatani bersubsidi yang mudah diakses, peningkatan harga gabah dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani.
4. Rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dibutuhkan peran penyuluh pertanian. Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran penyuluh pertanian dalam masyarakat pedesaan dengan cara peningkatan wawasan penyuluh pertanian dan keahliannya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluh pertanian.
5. Upaya untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menuju non pertanian, sejumlah strategi yang dapat dilakukan adalah :
  - a. Mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alih

fungsi lahan dengan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) dan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagaimana dalam amanat UU No. 41 Tahun 2009.

- b. Membatasi luas lahan yang dapat dialihfungsikan melalui Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kawasan P2B) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) difokuskan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Pengendalian LP2B. Aspek pengendalian dibagi atas 3 hal, yaitu insentif, disinsentif, dan alih fungsi. Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2009, kepada para petani yang lahannya masuk kategori LP2B, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian benih dan varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi, bantuan penerbitan sertifikat tanah, penghargaan bagi petani berprestasi dan keringanan pajak bumi dan bangunan.

#### Daftar Pustaka

- Alder J, Pitcher TJ, Preikshot D, Kaschner K, Ferriss B. 2000. Rapfish estimates How good is good?: a rapid appraisal technique for evaluation of the sustainability status fisheries of the North Atlantic. Ed. Pauly D, Pitcher TJ. Methods for Assessing the Impact of Fisheries on Marine Ecosystems of the North Atlantic. Fisheries Centre Research Reports. 8 (2): 195pp.
- BPS Provinsi Jambi, 2022.. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jambi 2023. Badan Pusat Statistik.
- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Evaluasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Jakarta (ID): Direktorat Pangan dan Pertanian.
- Catur TB, Purwanto J, Rhina UF, Ani SW. 2010. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Ilmu Pertanian Caraka Tani 25 (1): 38-42.
- [Dit PPL] Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. 2016. Pedoman Teknis SI-CPCL dan Pemetaan Desain Perluasan Sawah TA. 2016. Jakarta (ID): Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian.
- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2017. Pedoman teknis perluasan sawah pola swakelola 2017. Jakarta (ID): Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Hikmatullah, Sawiyo, Suharta N. 2002. Potensi dan kendala pengembangan sumber air untuk pencetakan sawah di luar Jawa. Jurnal Litbang Pertanian 21 (4): 115-123.
- [KEMENSETNEG] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Maya Sari, Eva.2020. Pola Konversi Lahan Tanaman Budidaya Di

- Provinsi Jambi. *Biolearning Journal* 7 (2) : 2020.
- Mulyani A, Ritung S, Las I. 2011. Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Litbang Pertanian* 30 (2): 7380.
- [PUSDATIN] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2019. Statistik pertanian 2019. Jakarta (ID): Sekretariat Jenderal.
- [PUSDATIN] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2020. Statistik pertanian 2020. Jakarta (ID): Sekretariat Jenderal.
- Rachmat M. 2011. Kebijakan lahan dalam membangun kemandirian pangan, hal 190-207. Ed. Pasaribu SM, Saliem HP, Soeparno H, Pasandaran E, Kasryno F. *Konversi dan Fragmentasi Lahan Ancaman terhadap Kemandirian Pangan*. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press.
- Simatupang P, Irawan B. 2002. Pengendalian konversi lahan pertanian: tinjauan ulang kebijakan lahan pertanian abadi. Pros. Seminar Nasional. Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian Tahun 2002. Jakarta (ID): Departemen Pertanian.
- Sumaryanto, Sudaryanto T. 2005. Pemahaman dampak negatif konversi lahan sawah sebagai landasan perumusan strategi pengendaliannya. Disampaikan dalam seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian lahan pertanian abadi, Kerja sama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3 – LPPM IPB) di Jakarta, 13 Desember 2005.
- Sumaryanto, Sudaryanto T. 2005. Pemahaman dampak negatif konversi lahan sawah sebagai landasan perumusan strategi pengendaliannya. Disampaikan dalam seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian lahan pertanian abadi, Kerja sama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3 – LPPM IPB) di Jakarta, 13 Desember 2005.
- Tjiptoherijanto P. 2001. Proyeksi penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja, dan peran serikat pekerja dalam peningkatan kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*.
- Wahyunto, Widiastuti F. 2014. Lahan sawah sebagai pendukung ketahanan pangan serta strategi pencapaian kemandirian pangan. *Jurnal Sumber daya Lahan*, Edisi Khusus Desember 2014: 17-30.
- Peraturan dan Perundang-undangan :
- Undang-Undang No.41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 1980 Tentang Mengenai Kebijakan Pencetakan Sawah.